



©2004 Sapja Anantanyu
Makalah Perorangan Semester Ganjil 2004
Falsafah Sains (PPS 702)
Program S3
November 2004

Dosen:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (Penanggung Jawab)
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
Dr. Ir. Hardjanto, MS

Posted 28 November 2004

GAMBARAN KEMISKINAN PETANI DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA

Oleh:

Sapja Anantanyu

P06103004/PPN)

sap_anan@yahoo.com

ABSTRACT

Farmer (peasant) is one of biggest community in Indonesia, but its existence is pulled over during the time. Various complicated problems have placed peasant at impecunious and low economics level. Peasant problems having the character of structural and the culture require to be solved to increase the better condition. Strive to lift level live and the community peasantry prosperity represents systematic and planed effort so that make themselves-reliance and progressively powered.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertanian masih merupakan sektor yang penting, sebab sektor ini menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 91.647.166 orang, 44,34 persen bekerja di sektor pertanian (Statistik Indonesia, 2002). Sektor pertanian merupakan penyedia pangan yang penting dalam menjaga stabilitas negara. Kontribusinya dalam menyumbang devisa dan dukungannya terhadap sektor industri tidak boleh diabaikan.

Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan unit usaha yang relatif sempit. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Masih rendahnya taraf kesejahteraan petani terlihat

dari hasil sementara Sensus Pertanian (SP) 2003 yang dibandingkan dengan SP 1993. Jumlah rumah tangga petani gurem (kecil) dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri atau menyewa, meningkat 2,6 persen per tahun, dari 10,8 juta rumah tangga tahun 1993 menjadi 13,7 juta rumah tangga tahun 2003. Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat dari 52,7 persen (1993) menjadi 56,5 persen (2003). Jumlah rumah tangga pertanian sendiri tercatat bertambah 2,2 persen per tahun dari 20,8 juta (1993) menjadi 25,4 juta (2003). Kenaikan persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan mengindikasikan semakin miskinnya petani di Indonesia (Kompas 3 Januari 2004).

Pembangunan sektor pertanian sudah selayaknya tidak hanya berorientasi pada produksi atau terpenuhinya kebutuhan pangan secara nasional, tetapi juga harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Pembangunan pertanian merupakan bagian yang terintegral dari Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pembangunan yang dilakukan sudah semestinya mengandung nilai-nilai: (a) Tercapainya *swasembada*, dalam arti kemampuan masyarakat untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan; (b) Peningkatan *harga diri*, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk dapat hidup mandiri terlepas dari penindasan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka; dan (c) Diperolehnya *kebebasan*, dalam arti kemampuan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan secara terus menerus bagi setiap individu maupun seluruh warga masyarakatnya.

Di masa mendatang sektor pertanian akan menghadapi persolan yang semakin serius yang memerlukan antisipasi secara tepat. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi semakin menempatkan sektor pertanian di Indonesia pada posisi sulit. Globalisasi berarti perubahan total dalam lingkungan tata niaga produk pertanian di dunia, disamping perubahan-perubahan lain yang menyangkut masalah proses alih teknologi pertanian dan sebagainya. Pada era tersebut Indonesia tidak hanya memproduksi produk-produk pertanian tetapi juga menjadi pasar dari produk-produk pertanian dari negara lain sehingga terjadi persaingan antara petani satu negara dengan negara lain.

Dalam menghadapi tantangan perekonomian pasar serta menyongsong era globalisasi, keberhasilan proses pembangunan pertanian tergantung pada penguasaan teknologi pertanian oleh petani dan kemampuan bersaing dari para petani suatu negara. Kondisi ini akan sulit mengingat kebanyakan pelaku usaha pertanian di Indonesia adalah petani-petani kecil. Skala usaha yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya (Reed, 1979:14). Di sisi lain, petani hanya mempunyai

sedikit kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang bagi usaha di luar pertanian (*off-farm* atau *out-farm*). Usaha petani tidak cukup besar untuk merespons kelebihan tenaga kerja.

Menurut Todaro (1994:62) bahwa pembangunan bukan semata-mata fenomena ekonomi, tetapi pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Jadi selain peningkatan pendapatan dan *output*, juga berurusan dengan perubahan mendasar tentang kelembagaan, sosial, dan struktur administrasi serta sikap masyarakat, kebiasaan dan kepercayaan.

Menurut rumusan hasil Konpernas XII PERHEPI, pengelolaan sumberdaya pertanian di Indonesia dihadapkan pada permasalahan struktural dan permasalahan kultural. Permasalahan struktural menyangkut faktor-faktor eksternal yang kurang mendukung, seperti: rendahnya teknologi yang diterapkan, terbatasnya akses modal, kelembagaan dan manajemen, kurangnya dukungan pemasaran, dan kelembagaan yang tidak mendukung. Permasalahan kultural ditandai oleh ciri masyarakat Indonesia, tingkat *karsanya* relatif rendah terutama diperani oleh 'budaya lunak' yang dicirikan: tidak adanya orientasi ke depan, tidak adanya keyakinan terhadap hari esok yang lebih baik, cepat menyerah, *refreatism* (lebih berorientasi pada akherat), dan lamban.

Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk: (a) mengungkapkan permasalahan kemiskinan yang dialami oleh petani, dan (b) mencoba menawarkan alternatif pemecahan masalah yang bertumpu pada usaha pengembangan sumberdaya petani. Tindakan yang dilakukan merupakan usaha-usaha untuk mengubah keadaan saat ini (*recent ststus*) dengan keadaan yang normatif/diharapkan/diinginkan (*normative/expected/desirable status*), yaitu kemampuan petani dalam mengembangkan potensi diri dan keluarganya untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya di atas garis kemiskinan.

PERMASALAHAN

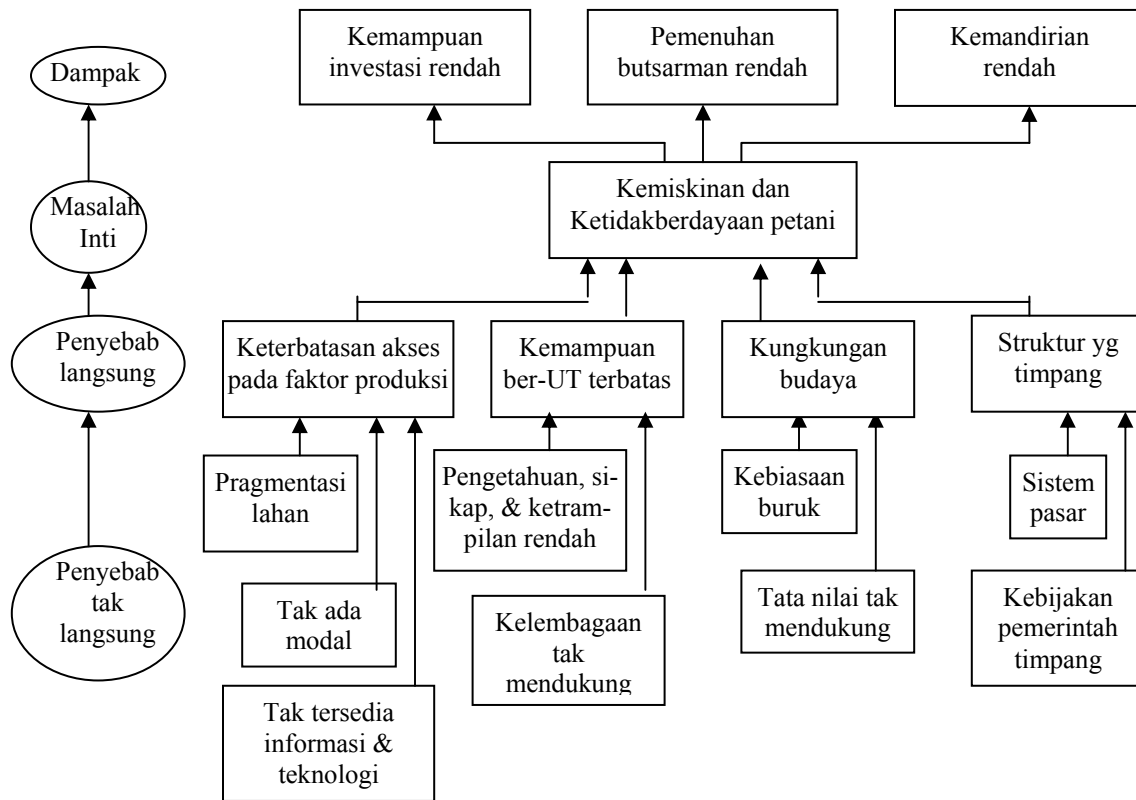
Kondisi Kekinian

Kenyataan yang dihadapi saat ini adalah petani berusahatani pada lahan yang sempit. Sebagian besar produk-produk pertanian di Indonesia dihasilkan oleh usahatani yang sempit itu. Dengan skala usaha yang kecil sangat sulit bagi petani untuk mengelola usahatani secara efisien. Di samping itu, petani Indonesia harus mengusahakan pertanian di dalam lingkungan tropika yang penuh resiko, seperti banyaknya hama, tidak menentunya curah hujan, dan sebagainya. Dalam kondisi yang penuh resiko ini para petani harus ekstra hati-hati dalam menerima inovasi. Kegagalan

memanfaatkan inovasi akan berakibat fatal bagi petani dan keluarganya. Di sisi lain, sampai saat ini belum ada perlindungan asuransi yang dapat menopang kegagalan petani. Kondisi ini menempatkan para petani dalam kondisi sulit dan dilematis.

Program-program pembangunan pertanian selama ini belum berpihak kepada petani kecil yang jumlahnya sangat banyak. Selain penguasaan lahan yang sempit, keterbatasan akses pada faktor produksi yang lain menjadi sebab keterpurukan petani. Situasi ekonomi yang ada, dengan ekonomi pasar dan kebijakan pertanian yang tidak berpihak ke petani semakin mendorong petani ke arah marginalisasi secara ekonomi dan sosial. Kondisi ini semakin parah karena sumberdaya manusia petani belum mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, selain pengaruh nilai-nilai budaya yang menyebabkan petani semakin terjebak dalam kemiskinan.

Gambaran mengenai kondisi kemiskinan petani saat ini, penyebab-penyebabnya, serta dampak dari kemiskinan itu, dapat dilihat pada gambar skema di bawah ini.



Gambar 1. Analisis Pohon Masalah (*Problem Tree Analysis*)

Dari gambaran permasalahan tersebut di atas, dampak negatif dari kemiskinan petani adalah sebagai berikut:

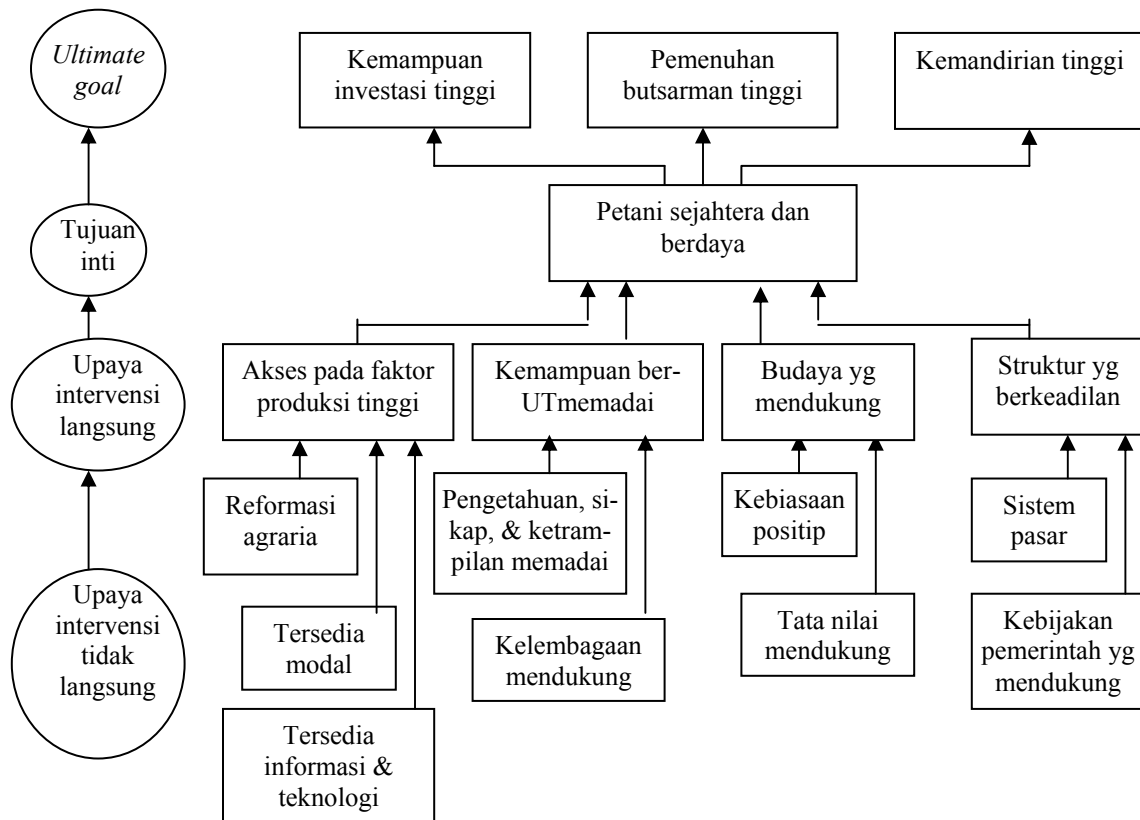
- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar yang rendah

Petani miskin dengan pendapatan (*income*) yang rendah biasanya masih berjuang dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar. Pendapatan yang rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara memadai sehingga kondisi ini akan berakibat pada rendahnya kualitas fisik dan kualitas non-fisik, seperti: prestasi fisik dan daya tahan tubuh yang rendah, rendahnya prestasi intelektual, kepercayaan diri yang rendah dan sebagainya.

- (2) Kemampuan investasi yang rendah
Pendapatan yang rendah lebih banyak terserap untuk pemenuhan kebutuhan, sehingga tidak ada sisa pendapatan yang bisa ditabung atau untuk investasi. Investasi yang rendah berarti ketidakmampuan petani menghasilkan barang produksi sehingga mengkondisikan kemiskinan secara permanen.
- (3) Kemandirian petani rendah
Kemiskinan juga menghambat petani untuk mengembangkan potensi-potensi yang masih dimiliki. Petani tidak bisa mengambil keputusan secara seluas dan mandiri. Mereka lebih berorientasi mengutamakan selamat daripada investasi.

Kondisi yang Diharapkan

Dari keadaan saat ini, diperlukan upaya-upaya untuk mengubah menjadi keadaan yang diharapkan atau diinginkan di masa mendatang. Gambar 2. di bawah memperlihatkan keadaan yang diinginkan melalui analisis pohon tujuan.



Gambar 2. Analisis Pohon Tujuan (*Objective Tree Analysis*)

BAGAIMANA MENGATASI MASALAH

Isu-isu Strategis

Bagaimana membawa petani di Indonesia keluar dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Berbagai pembahasan, kajian, forum diskusi dan semacamnya mengenai kemiskinan petani seringkali dilakukan dan digelar. Kegiatan dilakukan bisa dalam skala lokal, regional ataupun nasional. Kalangan yang membicarakan isu-isu kemiskinan petani juga sangat beragam, mulai dari ilmuwan di kampus, pemerintah atau dinas pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau pihak-pihak yang merasa punya komitmen dan menaruh perhatian pada kemiskinan petani. Berbagai isu-isu kemiskinan dan faktor penyebabnya dapat diteropong dan didekati dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda sehingga kondisi ini akan semakin menimbulkan kompleksitas permasalahan yang ada.

Berbagai permasalahan yang sering dikaitkan dengan fenomena kemiskinan petani oleh penulis dikelompokkan dalam beberapa isu utama sebagai berikut:

(1) Reformasi agraria

Lahan merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi kesejahteraan hidup petani. Lahan sangat berarti bagi petani sehingga tanpa memiliki lahan, seorang petani tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu memiliki lahan adalah keinginan dan harapan setiap petani. Namun keinginan tersebut seperti halnya sangat sulit untuk diwujudkan. Lahan pertanian yang terbatas harus diperebutkan oleh banyak pihak, termasuk mereka yang bukan petani. Hanya mereka yang bermodal besar yang keluar sebagai pemenang. Berbagai persaingan atau perebutan atas penguasaan lahan biasanya selalu memunculkan petani kecil sebagai pihak yang terpinggirkan. Mereka yang tak memiliki tanah pertanian akhirnya tersisih sebagai petani penggarap atau buruh tani.

Wiradi (1984:306) menyatakan bahwa masalah pemilikan tanah berpengaruh terhadap distribusi pendapatan sehingga hal ini dianggap sebagai masalah yang penting karena sumber timbulnya ketimpangan. Salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan kehidupan di pedesaan, khususnya di negara-negara agraris, adalah melakukan perombakan struktur penguasaan tanah. Di Indonesia usaha melaksanakan reformasi agraria telah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960). Namun berbagai permasalahan banyak muncul sehingga pelaksanaan reformasi agraria tersendat-sendat. Adanya reformasi bidang politik saat ini membuka wacana baru bahwa masalah

reforma agraria patut mendapat perhatian. Sistem penguasaan lahan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada produksi dan pendapatan petani.

(2) Modal dan Sarana Produksi Lain

Modal merupakan unsur utama yang penting bagi petani untuk melakukan aktivitas usahatani. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan barang-barang baru. Sumber-sumber pembentukan modal ini bisa berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar.

Keterbatasan modal bagi petani seringkali membawa petani pada pelepasan uang (rentenir) dengan bunga yang sangat tinggi. Lembaga keuangan yang ada, seperti bank, selama ini belum mampu dijangkau oleh petani. Prosedur yang berbelit, persyaratan yang rumit dan kaku menjadi hambatan yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh petani. Di kesempatan lain, penyediaan program-program kredit yang disediakan oleh pemerintah kurang bermanfaat bagi petani. Kredit seringkali diberikan dalam bentuk paket-paket yang jumlah maupun waktu pemberiannya sangat tidak tepat. Kondisi-kondisi ini menyebabkan petani yang sudah miskin bertambah lagi kemiskinannya. Ketersediaan modal dalam jumlah dan waktu yang sesuai sangat dibutuhkan oleh para petani. Selain itu, modal usaha ini harus mudah diperoleh petani dengan prosedur yang mudah, tentunya tanpa harus memerlukan agunan. Dalam hal ini diperlukan suatu kelembagaan yang mampu menjembatani antara lembaga keuangan (bank) dengan petani, dan sekaligus berperan sebagai lembaga penjamin kredit.

Selain ketersediaan modal, informasi dan teknologi pertanian sangat diperlukan oleh petani dalam mengupayakan peningkatan pendapatan dalam usahanya. Teknologi yang selalu berubah dengan berbagai terobosan inovasi di bidang pertanian diperlukan petani untuk meningkatkan produktivitas dan cara-cara mengembangkan usaha. Inovasi pertanian yang diintroduksi tentunya harus berorientasi kepada kebutuhan petani kecil, bukannya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu dengan mengorbankan petani kecil. Untuk itu diperlukan adanya lembaga-lembaga pengkajian teknologi pertanian, seperti: balai penelitian atau perguruan tinggi pertanian. Ketidakkampuan lembaga-lembaga tersebut mengembangkan riset yang menghasilkan teknologi pertanian untuk petani menyebabkan semakin tertinggalnya pertanian di tanah air karena kalah bersaing dengan produk pertanian negara tetangga.

(3) Pendidikan pertanian

Mosher (1991:156) menempatkan pendidikan pertanian sebagai faktor pelancar pembangunan (*the accelerators of agricultural development*). Pendidikan pertanian atau dikenal sebagai penyuluhan pertanian bagi petani dianggap penting karena kemampuan petani dan keputusan-keputusan yang diambil mengenai pelaksanaan usahatani akan sangat menentukan bagi tingkat kecepatan pembangunan pertanian. Combs dan Ahmed (1985:18-19) menyatakan perlunya pendidikan dalam pembangunan pedesaan karena akan memperluas kesempatan setiap individu merealisasikan seluruh potensinya.

Pendidikan non-formal bagi petani di Indonesia lebih dikenal dengan ‘penyuluhan pertanian’. Ruang lingkup penyuluhan pertanian di Indonesia sudah seharusnya dikembangkan, dengan cakupan: (a) pengembangan budidaya pertanian (*better farming*), (b) pengembangan usaha pertanian (*better business*), (c) pengembangan kelembagaan pertanian (*better organization*), (d) pengembangan masyarakat tani (*better community*), (e) pengembangan lingkungan usaha dan lingkungan hidup (*better environment*), dan (f) pengembangan kehidupan yang lebih sejahtera (*better living*) (Pambudy dan Adhi, 2002:7). Namun demikian, kegiatan penyuluhan pertanian yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah mendapat sorotan dan kritik oleh banyak pihak. Berbagai komentar muncul: ‘Penyuluhan bersifat *top-down* sehingga gagal mendidik petani menjadi mandiri’, ‘Penyuluhan hanya menguntungkan pada segelintir petani dan pihak-pihak tertentu’ dan lain-lain. Dari berbagai komentar tersebut tentunya kita berfikir bukannya penyuluhan itu tidak penting bagi petani tetapi cara-cara yang selama ini digunakan dalam penyuluhan yang perlu diubah atau dirombak.

(4) Kelembagaan Petani

Upaya meningkatkan daya saing petani salah satunya adalah pengembangan kelembagaan pertanian, pemberdayaan, pemantapan dan peningkatan kemampuan kelompok-kelompok petani kecil (Kartasasmita, 1997:31-32). Petani-petani kecil sebaiknya digerakkan untuk bergabung secara kolektif dalam suatu kelompok-kelompok, organisasi atau kelembagaan agar menjadi satu unit kekuatan produksi yang besar, tangguh dan memiliki produktivitas tinggi. Peningkatan kelompok-kelompok sekunder masyarakat tani, selain meningkatkan produktivitas usaha juga akan meningkatkan efisiensi usaha pertanian. Reed (1979:14) menawarkan dua alternatif untuk mengatasi permasalahan petani kecil, yaitu: (a) konsolidasi lahan usahatani menjadi usaha yang lebih luas, dan (b) memperluas skala pengelolaan dan penggunaan sumberdaya usahatani tanpa mengubah kepemilikan petani, melalui usahatani korporasi atau kelompok.

Kelembagaan petani yang diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal. Kelembagaan pertanian kurang menempatkan petani sebagai pengambil keputusan dalam usahatani, karena dominansi pengaruh intervensi pihak luar petani terhadap kelompok tani (Slamet, 2003:50). Pengembangan kelembagaan melalui penyuluhan pertanian justru menempatkan petani pada berbagai kelompok binaan yang dibentuk dari atas dan untuk kepentingan atas, sehingga posisi petani lemah dalam pengambilan keputusan kelompok. Kurang berhasilnya proyek-proyek pertanian yang berorientasi pada pembangunan kelembagaan petani, seperti: KUD, *corporate farming*, dan kelompok-kelompok usaha bersama yang lain; menunjukkan masih perlu kajian yang mendalam terhadap kelembagaan petani.

Organisasi atau kelembagaan petani diakui sangat penting untuk pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya organisasi petani di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan organisasi atau kelembagaan pada masyarakat petani. Intervensi yang terlalu besar dari pemerintah atau politisi seringkali menyebabkan organisasi itu bekerja bukan untuk petani tetapi lebih melayani kepentingan pemerintah atau para pengelolanya (van den Ban dan Hawkins, 1999:265). Perbedaan sosial dan kultural masyarakat petani di negara berkembang dengan asal bentuk kelembagaan yang diadopsi menyebabkan kelembagaan petani yang dibangun tidak berkembang. Bunch (1991:270-271) menegaskan pembangunan lembaga tidak sekedar memindahkan kerangka organisasi, tetapi juga harus memberikan ‘perasaan’ tertentu. Ciri-ciri masyarakat, perasaan, ketrampilan, sikap dan sikap moral, merupakan darah dan daging suatu lembaga.

(5) Struktur Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah

Pada awalnya era pembangunan nasional di Indonesia para ekonom mengharapkan pada suatu saat akan terjadi transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri. Sektor pertanian ‘ditekan’ dan diatur sedemikian rupa sebagai landasan bagi tumbuhnya sektor industri. Perekonomian yang timpang ini telah masih berlangsung sampai saat ini. Sektor industri yang diharapkan akan tinggal landas tidak juga mampu mewujudkan harapan itu. Dampak buruk dari kebijakan ini sangat dirasakan bagi petani. Nilai tukar (*rate of return*) produk pertanian masih tetap rendah di sisi lain sarana produksi harus dibeli dengan harga tinggi sehingga hal ini semakin menyudutkan posisi petani.

Disengaja atau tidak seringkali kebijakan-kebijakan pemerintah mengindikasikan adanya usaha pemihakan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai akses terhadap pembuat kebijakan. Di sisi lain, tidak ada satu kekuatan politik di Indonesia yang memperjuangkan secara nyata aspirasi petani. Petani harus pasrah dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka, seperti: penghapusan subsidi, kebijakan impor yang merugikan, penetapan harga produksi yang rendah, dan sebagainya.

Mengembangkan SDM Petani

Pemahaman Terhadap Petani

Istilah ‘petani’ dari banyak kalangan akademis sosial akan memberikan pengertian dan definisi yang beragam. Sosok petani ternyata mempunyai banyak dimensi sehingga berbagai kalangan memberi pandangan sesuai dengan ciri-ciri yang dominan. Moore mencatat tiga karakteristik petani, yaitu: subordinasi legal, kekhususan kultural, dan pemilikan *de facto* atas tanah. Wolf memberikan istilah *peasants* untuk petani yang dicirikan: penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam (Lansberger dan Alexandrov, 1981:9-10).

Shanin menunjuk pada ciri-ciri masyarakat petani (*peasant*) sebagai berikut: (a) satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda; (b) petani hidup dari usahatani, dengan mengolah tanah (lahan); (c) pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas; (d) petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah “orang kecil” terhadap masyarakat di atas-desa (Sayogyo, 1993).

Soekartawi dkk. (1986:1) mengidentifikasi ‘petani kecil’ dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) Berusahatani dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang meningkat, (b) Mempunyai sumberdaya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup yang rendah, (c) Bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsisten, dan (d) Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya.

Petani merupakan kelompok masyarakat yang memegang peranan penting, baik di negara industri maupun negara berkembang. Usahatani kecil merupakan bentuk usaha yang mengolah lahan terbatas, menggunakan semua atau sebagian tenaga kerja keluarga sendiri dalam kesatuan usaha ekonomi yang mandiri. Usahatani merupakan bentuk usaha paling banyak dan memasok sebagian besar hasil produksi pertanian. Tipe usahatani yang paling sering ditemui di banyak negara adalah usaha-

tani keluarga, mereka terorganisir menurut masing-masing struktur keluarga tani yang berlaku.

Blanckenburg dan Sachs (1989:28) menyebutkan bahwa salah satu ciri terpenting masyarakat pertanian yang membedakannya dari masyarakat industri adalah makna kelompok primer sebagai unsur membentuk masyarakat. Kelompok primer ditandai oleh kecilnya kelompok, lemahnya tingkat formalisasi, baik fungsi yang dipikul oleh kelompok maupun persatuan dan solidaritas anggota kelompok, juga lemahnya keterkaitan dengan norma-norma kelompok. Dalam masyarakat pertanian, kelompok primer lebih penting artinya dibandingkan kelompok sekunder yang bercirikan organisasi rasional, berorientasi ke tujuan yang spesifik, dan mempunyai jumlah anggota yang lebih banyak.

Mengupayakan Petani yang Mandiri

Dari gambaran tersebut di atas, bagaimanakah sebaiknya sumberdaya manusia petani yang diharapkan? Kemiskinan yang selalu melekat pada kehidupan petani dan keluarganya sudah seharusnya dihilangkan. Tidak ada pihak manapun yang sanggup melakukan hal itu kecuali petani itu sendiri. Pemerintah dan berbagai pihak mengklaim telah berusaha membantu petani untuk keluar dari masalah kemiskinan tetapi sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sebenarnya apa yang salah dalam pengembangan SDM petani yang sudah dilakukan selama ini.

Berbagai pendapat menyimpulkan bahwa selama ini proses pembelajaran yang dilakukan untuk petani tidak menghasilkan petani yang mempunyai kompetensi dan berdaya saing. Kegiatan penyuluhan bagi petani justru menempatkan petani sebagai obyek sehingga mematikan kreativitas dan keswadayaan yang dimiliki oleh petani. Petani diberikan berbagai inovasi, pengetahuan dan ketrampilan, tanpa diberi kesempatan berfikir untuk apa dan mengapa inovasi itu diberikan. Petani diberi berbagai fasilitas atau kemudahan tanpa diberitahu alasan yang rasional penggunaan berbagai fasilitas tadi. Petani diarahkan untuk melakukan berbagai hal tetapi tidak diajarkan bagaimana memecahkan masalahnya sendiri. Berbagai proyek pembangunan pertanian selama ini menjadikan petani sebagai konsumen atau *beneficiaries* tanpa ada kesempatan petani untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Pengalaman belajar tersebut akhirnya menyebabkan ketergantungan dan ketidakberdayaan petani pada sesuatu dari luar dirinya.

Menyadari akan kesalahan masa lalu, timbul kesadaran baru yang memandang petani dari sisi yang berbeda. Paradigma baru ini lebih menempatkan petani sebagai subyek pembangunan, petani didorong untuk lebih mandiri. Kemandirian dipandang sebagai sebuah konsep yang utuh, tetapi memiliki berbagai muka dan tercermin dalam berbagai bidang kehidupan (Kartasasmita, 1997:22). Kemandirian (*self-*

reliance) pertanian mengandung pengertian yang lebih jauh dari swasembada (*self-sufficiency*). Secara hakiki tidak hanya menuntut kebutuhan dari produksi sendiri, menciptakan penerimaan yang mampu menutupi pengeluarannya pada tingkat petani, tetapi juga keleluasaan dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya.

‘Kemandirian’, dalam Kamus Webster’s berasal dari kata *self-reliant* (*adj.*): *not dependent on others: having confidence in and exercising one’s own powers or judgement* (tidak tergantung pada orang lain: mempunyai kepercayaan dan pengambilan kekuasaan dan keputusan sendiri) atau *self-reliance* (*noun*): *reliance upon one’s own efforts, judgement, or ability* (mandiri pada usaha-usaha, pertimbangan, atau kemampuan sendiri). Verhagen (1996:22) mengemukakan bahwa kemandirian (*self-reliance*) adalah suatu suasana atau kondisi tertentu yang membuat seorang individu atau sekelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan individu atau kelompok.

Dijelaskan oleh Verhagen (1996:22), sarana untuk mencapai kemandirian adalah adanya keswadayaan. Swadaya adalah setiap tindakan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok manusia yang bertujuan untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi-aspirasi individual atau kolektif. Swadaya dalam usahatani berarti pengelolaan sumberdaya usahatani untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Petani tidak hanya menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai mengenai input dan teknik budidaya pertanian, tetapi juga ada kesempatan untuk bekerja sama dengan petani atau pihak-pihak lain.

Berbagai strategi pembelajaran perlu dilakukan untuk menempatkan kewenangan petani pada proporsi yang sebenarnya serta pencapaian kemandirian petani. Kegiatan penyuluhan sebagai *non-formal education* bagi petani oleh pemerintah, pada saat ini perlu direposisi dan revitalisasi. Gambaran penyuluhan pertanian ke depan, seperti ditegaskan Slamet (2003:52), perlu didasarkan pada visi dan misi yang secara jelas menempatkan petani dan usahatani sebagai sentral; pendekatan yang lebih humanistik, yaitu melihat petani sebagai manusia yang berpotensi, yang dihargai untuk dikembangkan kemampuannya menuju kemandiriannya. Dalam kaitan itu orientasi visi dan misi kelembagaan penyuluhan kembali ke khittah penyuluhan itu sendiri, yaitu pengembangan pemberdayaan petani sehingga petani lebih mampu meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya secara mandiri dan tidak ter subordinasi oleh kepentingan pihak lain dalam pengembangan usahatannya. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu lebih profesional, antara lain memerlukan reorientasi: (a) Dari instansi ke pengembangan kualitas individu penyuluh, (b) Dari pendekatan *top down* ke *bottom up*, (c) Dari hirarkhi kerja vertikal ke horizontal,

(d) Dari pendekatan instruktif ke partisipatif dan dialogis, dan (e) Dari sistem kerja linier ke sistem kerja jaringan.

PENUTUP

Dari uraian di atas beberapa kesimpulan yang bisa diambil adalah:

- (1) Sektor pertanian masih menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga perhatian terhadap sektor ini masih sangat diperlukan. Diperlukan reorientasi tujuan pembangunan sektor pertanian dari produksi dan pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional menjadi peningkatan taraf hidup petani.
- (2) Kemiskinan petani terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Faktor kultural meliputi struktur ekonomi dan kebijakan yang timpang, keterbatasan akses terhadap faktor produksi, sedangkan faktor kultural mencakup kemampuan sumberdaya daya petani yang rendah.
- (3) Upaya memecahkan permasalahan kemiskinan petani terkait dengan berbagai isu-isu strategis meliputi: (a) reformasi agraria, (b) modal dan sarana produksi yang lain, (c) pendidikan pertanian, (d) kelembagaan pertanian, dan (e) struktur dan kebijakan pemerintah. Bagaimana isu-isu ini ditangani secara proporsional dan terintegrasi agar permasalahan kemiskinan dapat dikurangi.
- (4) Pengembangan SDM petani perlu didasarkan pada pemahaman terhadap petani secara utuh dan diarahkan pada kemandirian petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Affendi. 2003. *Pembangunan Kelembagaan Wilayah Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kerangka Pendekatan Manajemen Ekosistem*. Makalah Kuliah Umum Desember 2003.
- Biro Pusat Statistik. 2002. *Statistik Indonesia 2002*. BPS. Jakarta.
- Bunch, Roland. 1991. *Dua Tongkol Jagung: Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal Pada Rakyat*. Terjemahan oleh Ilya Moeliono. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Combs, P.H. dan M. Ahmed. 1985. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-formal*. Terjemahan. CV Rajawali. Jakarta.
- Kartasmita, Ginandjar. 1997. "Meningkatkan Daya Saing Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional" dalam *Membangun Kemandirian dan Daya Saing Pertanian Nasional dalam Menghadapi Era Industrialisasi dan Perdagangan Bebas*. Prosiding Konferensi Nasional XII PERHEPI.

- Kompas tanggal 3 Januari 2003. “2003, Inflasi 5,06 Persen, Jumlah Petani Gurem Meningkatkan”.
- Landsberger, Henry A dan YU G. Alexandrov. 1981. Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial. Terjemahan Aswab Mahasin. CV Rajawali. Jakarta.
- Mosher, A.T. 1991. Menggerakkan dan Membangun Pertanian: Syarat-syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi. CV Yasaguna. Jakarta.
- Pambudy, Rachmat dan Adriyono K. Adhi. 2002. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, PPS IPB dan PAPPI. Jakarta.
- Reed, Edward. 1979. “Two Approaches to Cooperation in Rice Production in South Korea” dalam Group Farming in Asia. Editor John Wong. Singapore University Press. Kent Ridge, Singapore.
- Sayogyo. 1993. “Kata Pengantar” dalam Perlawanan Kaum Tani oleh James C. Scott. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Sjahrir. 1988. “Pembangunan Berdimensi Kerakyatan” dalam Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Penyunting D.C. Korten dan Sjahrir. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Slamet, Margono. 2003. “Menata Sistem Penyuluhan Pertanian Menuju Pertanian Modern” dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Penyunting Ida Yustina dan Ajad Sudradjat. IPB Press. Bogor.
- Soetrisno, Loekman. 1999. Pertanian pada Abad Ke-21. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Todaro, Michael P. 1994. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I Edisi Keempat. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Upton, M dan Q.B.O. Anthonio. 1965. Farming as a Business. Oxford University Press. New York.
- Van den Ban, A.W dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Terjemahan oleh A.D. Herdiasti. Kanisius. Yogyakarta.
- Verhagen, Koenraad. 1996. Pengembangan Keswadayaan: Pengalaman LSM di Tiga Negara. Terjemahan. Puspa Swara. Jakarta.
- Von Blanckenurg, Peter dan Reinhold Sachs. 1989. “Masyarakat Tani dalam Membangun” dalam Sosiologi Pertanian. Penyunting Ulrich Planck. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Webster’s Third New International Dictionary.
- Wiradi, G. 1984. “Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria” dalam Dua Abad Penguasaan Tanah. Penyunting M.P. Tjondronegoro dan G. Wiradi. PT Gramedia. Jakarta.